

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan suatu laporan keuangan diperlukan untuk memberikan informasi yang sangat relevan mengenai posisi keuangan suatu entitas pada periode akuntansi, sehingga suatu laporan keuangan dapat menjadi suatu alat yang sangat berguna untuk membantu top management di dalam proses pengambilan suatu keputusan.

Dalam sektor pemerintahan, penyusunan laporan keuangan merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas keuangan kepada publik/masyarakat, sehingga didalam informasi laporan keuangan pemerintah harus berkualitas. Kriteria dan unsur pembentuk kualitas informasi laporan keuangan memang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Untuk mencapai tujuan, karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang akan dikehendaki (Budiawan, 2014).

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pelatihan kerja, mengingat bahwa melalui pelatihan kerja mampu memberikan tambahan kemampuan dalam menghadapi perubahan maupun penyesuaian sistem kerja di masa yang akan datang. Menurut Yudhi dan Meifida (2006), mengatakan bahwa

peningkatan pengetahuan yang muncul dari pelatihan formal sama bagusnya dengan yang didapat dari pengalaman khusus. Pengalaman tersebut berupa kegiatan-kegiatan misalnya: seminar, simposium, lokakarya pelatihan itu sendiri dan kegiatan penunjang keterampilan lainnya (Wungow, 2016)

Menurut Rivai dan Sagala (2011:212) pelatihan kerja adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan kerja berkaitan dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Dari beberapa pengertian di atas, pelatihan kerja adalah sebuah proses untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan dapat melatih kemampuan, keterampilan, keahlian dan pengetahuan karyawan guna melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan di suatu perusahaan.

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Malaya S. P. Hasibuan (2008: 69) mengatakan pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan. Sedangkan pengertian pendidikan menurut Soekidjo Notoatmodjo (dalam Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, 2008: 134) adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan organisasi yang bersangkutan. Menurut Siagian (dalam Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, 2008: 134), pengertian pendidikan adalah keseluruhan proses, teknik dan metode belajar mengajar dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pendidikan pada dasarnya adalah proses pengembangan sumber daya manusia, biasanya peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Pendidikan formal berkaitan erat dengan segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan manusia mulai perkembangan fisik, kesehatan keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan Iman. Perkembangan ini mengacu kepada membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dan kehidupan alamiah menjadi berbudaya dan bermoral. Dengan pendidikan formal yang memadai, staf bagian keuangan/akuntansi akan lebih mudah untuk mengerti dan memahami pekerjaan yang harus dilakukan. Maka dapat disimpulkan, semakin tinggi tingkat pendidikan formal staf bagian keuangan/akuntansi dan dengan latar belakang akuntansi akan sangat membantu dalam membuat laporan keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan atau sering disebut

dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi (pontoh, 2016).

Kekuatan koersif merupakan posisi dimana individu yang lebih tinggi didalam organisasi memberikan suatu wewenang kepada seseorang untuk memberi hukuman dan peringatan maupun kritik kepada orang-orang pada level yang lebih rendah darinya. Langkah koersif digunakan untuk memotivasi kinerja dalam bentuk *shock therapy* (Ashworth, 2009).

Pengendalianintern pemerintah merupakan cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif adalah agar laporan keuangan reliabel.

Fenomena mengenai pelaporan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena fakta di lapangan menunjukkan masih banyak terdapat penyimpangan yang dapat ditemukan oleh BPK. BPK menemukan 4.412 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri atas 1.586 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 1.935 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 891 kasus

kelemahan struktur pengendalian internal (Budiawan dan Purnomo, 2014).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan (Budiawan dan purnomo, 2014). Sedangkan menurut Riandani (2017) sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Ini berarti bahwa hubungan SPI searah dengan kualitas laporan keuangan, semakin tinggi sistem pengendalian intern maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Budiawan dan Purnomo (2014) mengenai Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan kekuatan koersif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya penelitian (Wungow, Lambey, dan Pontoh 2016) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan pelatihan kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan Budiawan dan Purnomo (2014) Kiranayanti dan Erawati (2016) menyatakan bahwa sistem

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah. (Muzahid 2014) juga menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan pelatihan kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten Aceh Utara.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya yaitu pengaruh sistem pengendalian intenal dan kekuatan koersif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena masih terdapat *research gap* yang berupa perbedaan hasil penelitian maka penelitian ini menambahkan variabel yaitu tingkat pendidikan dan pelatihan kerja. Dasar penambahan variabel ini mengacu pada hasil penelitian (Wungow, Lambey, dan Pontoh 2016) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan pelatihan kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan acuan pada penelitian yang dilakukan oleh Budiawan dan Purnomo (2014) dengan perbedaan penelitian ini akan menggunakan sampel pemerintahan di Kabupaten Demak, alasan pemilihan sampel di Kabupaten Demak adalah untuk mempermudah ruang lingkup dan mempercepat waktu penelitian. Dari latar belakang masalah tersebut maka akan dilakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kekuatan Koersif, Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.2. Rumusan Masalah

Dalam sektor publik, kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor diantaranya yaitu sistem pengendalian internal (Budiawan, 2014 dan Purnomo, 2014), kekuatan koersif (Budiawan, 2014 dan Purnomo, 2014), tingkat pendidikan (Wungow, 2016; Lambey, 2016; dan pontoh, 2016), pelatihan kerja (Muzahid, 2014). Faktor tersebut sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas sesuatu hal, penyusunan laporan keuangan diperlukan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan suatu entitas pada periode akuntansi (Budiawan 2014). Maka dari itu kualitas laporan keuangan sangat penting untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan ?
2. Bagaimana Pengaruh Kekuatan Koersif terhadap Kualitas Laporan Keuangan ?
3. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
4. Bagaimana Pengaruh Masa Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah provinsi jawa tengah
2. Untuk menganalisis pengaruh Koersif terhadap Kualitas Laporan

Keuangan pemerintah provinsi jawa tengah

3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah provinsi jawa tengah
4. Untuk menganalisis pengaruh Masa Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah provinsi jawa tengah

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu dorongan untuk meningkatkan kualitas pada laporan keuangan pemerintah daerah, agar kualitas **laporan keuangan daerah dapat lebih baik dalam pembuatannya.**

2. Bagi para akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi informasi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi pemerintah daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan sumbangan data mengenai sistem pengendalian internal, kekuatan koersif, tingkat pendidikan, dan pelatihan kerja terhadap kualitas laporan keuangan daerah.